

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang berupa Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) yang diterbitkan oleh BPK RI perwakilan Provinsi Lampung, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk pertumbuhan ekonomi dan data jumlah SKPD dan jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang diperoleh dari website resmi BPS. Dokumen Laporan Realisasi APBD dari tahun 2013 sampai 2015, yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemilihan sample dilakukan dengan cara menggunakan metode *purposive sampling*. Prosedur pemilihan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Prosedur Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Jumlah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2013 – 2015.	15
2	Kabupaten/ Kota yang tidak masuk kriteria sample : a. Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang tidak memiliki laporan realisasi APBD pada tahun Anggaran 2013-2015 dan telah diaudit oleh BPK. b. Kabupaten/Kota yang tidak menyediakan data jumlah	(0) (1)

	kasus kelemahan pengendalian internal yang diterbitkan oleh BPK. c. Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang tidak mengalami pertumbuhan ekonomi dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) minimal 3 tahun pada tahun 2013-2015.	(0)
3	Total Sampel Penelitian	14
4	Jumlah Observasi Penelitian Selama 3 Tahun (14x3 Tahun)	42
5	Data Perusahaan yang di Outlier	(7)
	Total keseluruhan perusahaan	35

Sumber : *www.bpk.go.id*, *www.bps.go.id* dan *www.djpk.go.id* data diolah 2017.

Tabel 4.1 menunjukkan jumlah keseluruhan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung selama periode 2013 sampai 2015. Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang tidak memiliki laporan realisasi APBD pada tahun Anggaran 2013-2015 dan telah diaudit oleh BPK sebanyak 0 kabupaten. Kabupaten/Kota yang tidak menyediakan data jumlah kasus kelemahan pengendalian internal yang diterbitkan oleh BPK sebanyak 1 Kabupaten. Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang tidak mengalami pertumbuhan ekonomi dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) minimal 3 tahun pada tahun 2013-2015 sebanyak 0 Kabupaten/Kota. Sehingga total observasi penelitian ialah 14 Kabupaten/Kota. Jadi, total observasi penelitian selama 3 tahun sebanyak 42 Kabupaten/Kota.

Dari data di atas dapat terlihat bahwa jumlah data (N) sebanyak 35 dari semula 42 data, hal ini dikarenakan adanya data outlier yakni data yang mengganggu atau data yang sifatnya ekstrim sehingga menyebabkan data tidak Normal yang dapat mengakibatkan penelitian terganggu. Dengan adanya masalah tersebut maka penulis menghapus data outlier, menurut Suliyanto (2011:79) cara untuk Uji Kelayakan Model layak digunakan adalah dengan menghilangkan data yang dianggap sebagai penyebab data tidak layak, sehingga dengan membuang data tersebut maka data akan semakin mendekati nilai rata-ratanya.

4.1.2 Deskripsi Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan. Sampel dipilih dari Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang menyediakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Ringkasan sampel penelitian disajikan dalam tabel 4.2:

Tabel 4.2
Daftar Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2013-2015
dan sesuai dengan kriteria sampel

No	Nama Kabupaten/ Kota
1	Lampung Barat
2	Lampung Selatan
3	Lampung Tengah
4	Lampung Utara
5	Lampung Timur
6	Tanggamus
7	Tulang Bawang
8	Waykanan
9	Bandar Lampung
10	Metro
11	Pesawaran
12	Pringsewu
13	Mesuji
14	Tulang Bawang Barat

4.2 Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), *standar deviasi*, *varian*, *maksimum*, *minimum*, *sum range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi). Untuk memberikan gambaran analisis *statistic deskriptif* (ghozali, 2011:19). Berikut Hasil *statistic deskriptif* dengan bantuan komputer program SPSS V.20 disajikan pada tabel 4.3 :

Table 4.3
Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
kelemahan pengendalian internal	35	2.00	16.00	7.6000	2.74612
pertumbuhan ekonomi	35	.05	.14	.0989	.01840
pendapatan asli daerah	35	10000.00	98569.00	40950.5714	24150.18604
belanja modal	35	109401.00	371077.00	226066.2857	61213.29608
kompleksitas daerah	35	10.00	51.00	29.8857	11.78676
ukuran pemerintah daerah	35	145985.00	1239096.00	510637.3143	298890.62959
Valid N (listwise)	35				

Sumber: data diolah 2017

Berdasarkan tabel 4.2 di atas yaitu tabel kerja hasil Uji Statistik Deskriptif, maka dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Kelemahan Pengendalian Internal

Kelemahan Pengendalian Internal berkisar antara 2.00 – 16.00 dengan nilai *mean* (rata-rata) sebesar 7.6000 dan standar deviasi 2.74612. Daerah yang memiliki Kelemahan Pengendalian Internal terendah dalam penelitian ini adalah Metro pada tahun 2013 dan 2015 sebesar 2.00 sedangkan Daerah dengan Kelemahan Pengendalian Internal tertinggi adalah Lampung Utara pada tahun 2013 sebesar 16.00. Hal ini berarti *Kelemahan Pengendalian Internal* memiliki hasil baik karena standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan lebih rendah dari nilai mean (ghozali,2013).

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi diproksikan dengan *PDRB* berkisar antara 0.05 – 0.14 dengan nilai *mean* (rata-rata) sebesar 0.0989 dan standar deviasi 0.01840. Daerah yang memiliki Pertumbuhan Ekonomi terendah dalam penelitian ini adalah Metro

lampung Timur pada tahun 2015 sebesar 0.05 sedangkan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi tertinggi adalah Pesawaran pada tahun 2015 sebesar 0.14. Hal ini berarti *Pertumbuhan Ekonomi* memiliki hasil baik karena standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan lebih rendah dari nilai rata-rata.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah diproksikan dengan *PAD* berkisar antara 10000.00 – 98569.00 dengan nilai *mean* (rata-rata) sebesar 40950.5714 dan standar deviasi 24150.18604. Daerah yang memiliki *Pendapatan Asli Daerah* terendah dalam penelitian ini adalah Pringsewu pada tahun 2014 sebesar 10000.00 sedangkan Daerah dengan *Pendapatan Asli Daerah* tertinggi adalah Lampung Tengah pada tahun 2015 sebesar 98569.00. Hal ini berarti *Pendapatan Asli Daerah* memiliki hasil baik karena standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan lebih rendah dari nilai rata-rata.

4. Belanja Modal

Belanja Modal yang diproksikan dengan *BM* berkisar antara 109401.00 – 371077.00 dengan nilai *mean* (rata-rata) sebesar 226066.2857 dan standar deviasi 61213.29608. Daerah yang memiliki *Belanja Modal* terendah dalam penelitian ini adalah Metro pada tahun 2013 sebesar 109401.00 sedangkan Daerah dengan *Belanja Modal* tertinggi adalah Lampung Selatan pada tahun 2014 sebesar 98569.00. Hal ini berarti *Belanja Modal* memiliki hasil baik karena standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan lebih rendah dari nilai rata-rata.

5. Kompleksitas Daerah

Kompleksitas Daerah yang diproksikan *Jumlah SKPD* berkisar antara 10.00 – 64.00 dengan nilai *mean* (rata-rata) sebesar 29.8857 dan standar deviasi 16.27376. Daerah yang memiliki *Kompleksitas Daerah* terendah dalam penelitian ini adalah Lampung Barat pada tahun 2013-2015 sebesar 10.00. sedangkan Daerah dengan *Kompleksitas Daerah* tertinggi adalah Way Kanan pada tahun 2013 dan 2015 sebesar 51.00. Hal ini berarti *Kompleksitas Daerah* memiliki hasil

baik karena standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan lebih rendah dari nilai rata-rata.

6. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran Pemerintah Daerah yang diproksikan *Jumlah Penduduk* berkisar antara 145985.00 – 1239096.00 dengan nilai *mean* (rata-rata) sebesar 510637.3143 dan standar deviasi 298890.62959. Daerah yang memiliki Ukuran Pemerintah Daerah terendah dalam penelitian ini adalah Metro pada tahun 2013 sebesar 145985.00. Sedangkan Daerah dengan Ukuran Pemerintah Daerah tertinggi adalah Lampung Tengah pada tahun 2015 sebesar 1239096.00. Hal ini berarti *Ukuran Pemerintah Daerah* memiliki hasil buruk karena standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan lebih tinggi dari nilai rata-rata.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Persyaratan untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda adalah terpenuhinya asumsi klasik. Untuk mendapatkan nilai yang efisien dan tidak bias atau BLUE (*Best Linear Unbias Estimator*) dari satu persamaan regresi berganda, maka perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan memenuhi persyaratan asumsi klasik.

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan menguji apakah dalam model penelitian variabel terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi nilai residual normal atau mendekati normal. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan pengujian *Kolmogorov-Smirnov test*. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.17949445
	Absolute	.100
Most Extreme Differences	Positive	.100
	Negative	-.083
Kolmogorov-Smirnov Z		.592
Asymp. Sig. (2-tailed)		.875

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil Uji Normalitas dengan menggunakan uji *onesampelkolmogorov-smirnov* yang dipaparkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *signifikan statistic (two-tailed)* untuk *Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Kompleksitas Pemerintah Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah* sebesar 0.875 dengan nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,592. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai signifikan dengan uji *one sampel kolmogorov-smirnov* untuk semua variabel lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal dan penelitian dapat dilanjutkan (Ghozali,2013).

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	10.511	20.241		.519	.607		
1 pertumbuhan ekonomi	-2.986	22.678	-.020	-.132	.896	.941	1.063
Pendapatan asli daerah	-2.800	.812	-.566	-3.447	.002	.807	1.239
Belanja modal	-.693	2.014	-.070	-.344	.733	.529	1.892
kompleksitas daerah	-.009	.037	-.037	-.237	.815	.884	1.132
Ukuran pemerintah	2.732	1.065	.577	2.566	.016	.430	2.327

a. Dependent Variable: kelemahan pengendalian internal

Berdasarkan uji multikolinearitas pada table 4.5 Menunjukkan hasil perhitungan *varian inflatanion faktor (VIF)* menunjukkan bahwa *Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan asli daerah, Belanja modal, Kompleksitas daerah, Ukuran pemerintah daerah* memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan *Tolerance* lebih dari 0,10 yaitu *Pertumbuhan ekonomi* memperoleh nilai VIF sebesar 1,063 dengan nilai *Tolerance* sebesar 0,941, *Pendapatan asli daerah* memperoleh nilai VIF sebesar 1,239 nilai *Tolerance* sebesar 0,807, *Belanja modal* memperoleh nilai VIF sebesar 1,892 dengan nilai *Tolerance* sebesar 0,529, *Kompleksitas daerah* memperoleh nilai VIF sebesar 1,132 dengan nilai *Tolerance* sebesar 0,884, *Ukuran pemerintah daerah* memperoleh nilai VIF sebesar 2,327 dengan nilai *Tolerance* sebesar 0,430 maka memperoleh kesimpulan tidak terdapat korelasi antara variabel bebas atau tidak terjadi multikolinearitas.

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (ghozali, 2013). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.608 ^a	.370	.261	2.35991	2.037

a. Predictors: (Constant), ukuran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, kompleksitas daerah, pendapatan asli daerah, belanja modal

b. Dependent Variable: kelemahan pengendalian internal

Berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh nilai Dw sebesar 2.037 dengan jumlah sample sebanyak 35 serta jumlah variabel Independen (K) sebanyak 5, maka nilai *durbin watson* akan di dapat dl sebesar 1.160 dan du sebesar 1,802 dengan kesimpulan bahwa $dW > dl$ sehingga $2.037 > 1.160$ maka berarti tidak terjadi autokorelasi.

4.2.2.4 Uji Heterokedositas

Uji heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah varian residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan. pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan Uji *Glejser* dapat dilakukan meregres nilai absolut terhadap variabel independen. Apabila variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan bahwa penelitian terbebas dari gangguan heteroskedastisitas salah

satunya dengan menggunakan koefisien signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 5% (0,05). Apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas.

Tabel 4.7
Uji Heterokedositas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-6.607	11.487		-.589	.351
Pertumbuhan Ekonomi	6.198	11.963	.098	.554	.484
Pendapatan asli daerah	.212	.479	.090	.449	.633
Belanja modal	-.088	1.132	-.018	-.067	.739
kompleksitas daerah	-.025	.016	-.279	-1.564	.133
Ukuran pemerintah	.503	.531	.265	.898	.456

a. Dependent Variable: ABS_RESIDUAL

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

4.3.1 Koefisien Determinasi (Godness of Fit Test)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variansi variabel dependen (Ghozali, 2013).

Tabel 4.8
Koefisien Determinasi (Godness of Fit Test)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.608 ^a	.370	.261	2.35991

- a. Predictors: (Constant), ukuran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, kompleksitas daerah, pendapatan asli daerah, belanja modal
- b. Dependent Variable: kelemahan pengendalian internal

Pada model summary, Adjusted R Square sebesar 0,261 yang berarti bahwa korelasi atau hubungan antara variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 37 % hal ini berarti 63 % kelemahan pengendalian internal dapat diukur dengan *pertumbuhan ekonomi(PDRB)*, *pendapatan asli daerah(PAD)*, *belanja modal(BM)*, *Kompleksitas daerah*, *Ukuran pemerintah daerah* , Sisanya 63 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.3.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi layak atau tidak untuk digunakan. Pada pengujian ini ditetapkan nilai signifikan sebesar 5%. Hal ini menunjukkan jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan 0,05 maka model ini layak digunakan dan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka model ini tidak layak digunakan. Berikut adalah hasil pengujian kelayakan model dengan uji kelayakan model dalam penelitian ini, pengujian bersifat satu arah dengan *level of significant* sebesar 0,05 :

Tabel 4.9

Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	94.893	5	18.979	3.408	.015 ^b
Residual	161.507	29	5.569		
Total	256.400	34			

a. Dependent Variable: kelemahan pengendalian internal

b. Predictors: (Constant), ukuran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, kompleksitas daerah, pendapatan asli daerah, belanja modal

Dari uji ANOVA atau f_{test} , diperoleh f_{hitung} sebesar 3,408 dengan tingkat signifikansi yang menunjukkan 0,015. Kelemahan Pengendalian Internal pengujian yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat

disimpulkan bahwa *pertumbuhan ekonomi(PDRB)*, *Pendapatan asli daerah(PAD)*, *belanja modal(BM)*, *kompleksitas daerah*, *ukuran pemerintah daerah* secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap *kelemahan pengendalian internal* karena signifikansi penelitian lebih kecil dari 0,05 ($0,015 < 0,05$) (Ghozali, 2013).

4.3.3 Uji Statistik t (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independennya. Berdasarkan hasil pengolahan SPSS versi 20, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.10
Uji Statistik t (Uji t)

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	10.511	20.241		.519	.607
	pertumbuhan ekonomi	-2.986	22.678	-.020	-.132	.896
	zx2	-2.800	.812	-.566	-3.447	.002
	zx3	-.693	2.014	-.070	-.344	.733
	kompleksitas daerah	-.009	.037	-.037	-.237	.815
	zx5	2.732	1.065	.577	2.566	.016

a. Dependent Variable: kelemahan pengendalian internal

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 10.511 - 2.986X_1 - 2.800X_2 - 0.693X_3 - 0,009X_4 + 2.732X_5 + e$$

Keterangan : Y = Pengendalian internal
 α = Konstanta
 X_1 = Pertumbuhan Eknomi
 X_2 = Pendapatan Asli Daerah
 X_3 = Belanja Modal
 X_4 = Jumlah SKPD

X_5 = Ukuran Pemerintah Daerah
 e = Koefisien *error*

Nilai konstan bertanda positif sebesar **10.511** menyatakan, bahwa jika tidak ada kegiatan dari ke lima variabel bebas tersebut yang mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal, maka Kelemahan Pengendalian Internal adalah positif. Koefisien regresi X_1 bertanda negatif sebesar **2.986** menyatakan, bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh yang negatif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Koefisien regresi X_2 bertanda negatif sebesar **2.800** menyatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang negatif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Koefisien regresi X_3 bertanda negatif sebesar **0.693** menyatakan, bahwa variabel Belanja modal memiliki pengaruh yang negatif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Koefisien regresi X_4 bertanda negatif sebesar **0.009** menyatakan, bahwa variabel Kompleksitas daerah memiliki pengaruh negatif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Koefisien regresi X_5 bertanda positif sebesar **2.732** menyatakan, bahwa variabel Ukuran Pemerintah Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.9 diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Pengendalian Internal
 Variabel *Pertumbuhan ekonomi* memiliki nilai signifikan sebesar $0,896 > 0,05$ dapat disimpulkan bahwa PDRB yang diprosikan oleh *jumlah PDRB* tidak berpengaruh terhadap *kelemahan pengendalian internal*.
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal
 Variabel *Pendapatan asli daerah* memiliki nilai signifikan sebesar $0,002 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh terhadap *kelemahan pengendalian internal*.

3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Internal

Variabel *Belanja Modal* memiliki nilai signifikan sebesar $0,733 > 0,05$ dapat disimpulkan bahwa *Belanja modal* tidak berpengaruh terhadap *kelemahan pengendalian internal*.

4. Pengaruh Kompleksitas Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal

Variabel *Kompleksitas daerah* memiliki nilai signifikan sebesar $0,815 > 0,05$ dapat disimpulkan bahwa *kompleksitas daerah* yang diukur dengan jumlah SKPD tidak berpengaruh terhadap *kelemahan pengendalian internal*.

5. Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal

Variabel *ukuran pemerintah daerah* memiliki nilai signifikan sebesar $0,016 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa *ukuran pemerintah daerah* yang diukur dengan jumlah penduduk berpengaruh terhadap *kelemahan pengendalian internal*.

Tabel 4.11
Hasil Penelitian

Hipotesis Penelitian	Hasil Uji
H1= <i>Pertumbuhan Ekonomi</i> tidak berpengaruh terhadap <i>kelemahan pengendalian internal</i>	Ha ditolak
H2= <i>Pendapatan asli daerah</i> berpengaruh terhadap <i>kelemahan pengendalian internal</i> .	Ha diterima
H3= <i>Belanja Modal</i> tidak berpengaruh terhadap <i>kelemahan pengendalian internal</i> .	Ha ditolak
H4= <i>Kompleksitas daerah</i> tidak berpengaruh terhadap <i>kelemahan pengendalian internal</i> .	Ha ditolak
H5= <i>Ukuran pemerintah daerah</i> berpengaruh terhadap <i>kelemahan pengendalian internal</i> .	Ha diterima

4.4 Pembahasan

Penelitian ini merupakan studi analisis untuk mengetahui pengaruh *pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, belanja modal, kompleksitas daerah dan ukuran pemerintah daerah* terhadap *kelemahan pengendalian internal* pemerintah daerah di Kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2013- 2015.

4.4.1 *Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Pengendalian Internal*

Dari uji hipotesis pertama yang dinyatakan dalam notasi (H_1) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada periode 2013 sampai 2015 dinyatakan bahwa (H_1) ditolak. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2013 sampai 2015. Hal ini juga dapat dilihat dari output yang dihasilkan dengan menggunakan uji t yang menunjukkan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} .

Hasil ini menjelaskan bahwa semakin besar atau kecilnya pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjamin pengendalian internalnya juga lebih baik dari pemerintah daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Sebagian besar daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat, namun pertumbuhan yang baik belum tentu diikuti dengan peningkatan maupun pengurangan jumlah kasus kelemahan pengendalian internal. Nirmala (2012) menjelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal, hal ini disebabkan oleh penggunaan pengukuran pertumbuhan ekonomi yang hanya diukur pada perubahan laju PDRB dari tahun ketahun. Jika pengukuran perubahan laju

pertumbuhan ekonomi dilakukan beberapa tahun minimal lima tahun, kelemahan – kelemahan pengendalian internal akan sedikit ditemukan.

4.4.2 Pendapatan Asli Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal

Dari uji hipotesis kedua yang dinyatakan dalam notasi (H_2) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada periode 2013 sampai 2015 dinyatakan bahwa (H_2) diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2013 sampai 2015. Hal ini juga dapat dilihat dari output yang dihasilkan dengan menggunakan uji t yang menunjukkan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} .

Hasil ini menjelaskan bahwa Semakin banyak jumlah sumber pendapatan yang terdapat pada PAD, justru akan membuat masalah pada pengendalian internal, hal ini dikarenakan PAD dapat menjadi sebuah ladang terjadinya tindak kecurangan dan penyelewengan pada pos-pos rawan. Pemerintah daerah yang memiliki jumlah pendapatan yang tinggi dan banyaknya pos-pos rawan akan sulit melakukan pengawasan terhadap pendapatan yang diterima. Dan PAD (bersumber dari pajak daerah, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan) secara leluasa dikelola oleh daerah, sehingga terdapat kemungkinan penyelewengan pada dana tersebut. Perlunya pengawasan terhadap pos-pos rawan tersebut dapat dicegah dengan adanya implementasi sistem pengendalian internal yang baik.

4.4.3 Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Internal

Dari uji hipotesis ketiga yang dinyatakan dengan notasi (H_3) menyatakan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal Kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga

Belanja Modal berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada periode 2013 sampai 2015 dinyatakan bahwa (H_3) ditolak. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2013 sampai 2015. Hal ini juga dapat dilihat dari output yang dihasilkan dengan menggunakan uji t yang menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} .

Hasil ini menjelaskan bahwa hubungan negatif yang dimiliki belanja modal dengan kelemahan pengendalian internal dapat diinterpretasikan bahwa jika anggaran belanja modal yang dialokasikan oleh pemerintah daerah besar, maka jumlah kasus pengendalian internal akan berkurang, jumlah anggaran belanja modal yang relatif besar membuat pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam memanfaatkan dan mengelolanya. Sehingga pemerintah daerah berusaha untuk menerapkan pengendalian internal yang baik dan memadai terhadap pengelolaan belanja modal. Dan pemerintah akan berusaha secara maksimal dalam menjalankan pemerintahannya untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini dicapai oleh pemerintah, maka rakyat selaku principal akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. Pemerintah akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerjanya, sehingga tujuan organisasi akan tercapai secara maksimal.

4.4.4 Kompleksitas Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal

Dari uji hipotesis keempat yang dinyatakan dengan notasi (H_4) menyatakan bahwa Kompleksitas Daerah (jumlah SKPD) berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal Kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil uji hipotesis keempat Kompleksitas Daerah tidak berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada periode 2013 sampai 2015 dinyatakan bahwa (H_4) ditolak. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Kompleksitas Daerah tidak berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2013

sampai 2015. Hal ini juga dapat dilihat dari output yang dihasilkan dengan menggunakan uji t yang menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} .

Hasil ini menjelaskan bahwa Kompleksitas Daerah tidak berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik antara kecamatan dan SKPD dengan segmen bisnis sehingga jumlah kecamatan maupun jumlah SKPD tidak tepat digunakan sebagai ukuran kompleksitas. Pemerintah daerah yang memiliki jumlah kecamatan dan jumlah SKPD yang besar belum tentu lebih kompleks. Hal ini dikarenakan setiap kecamatan dan SKPD relatif tidak jauh berbeda, melaksanakan fungsi yang sama, dan lingkup kerja yang sederhana. Jadi meskipun jumlah kecamatan dan jumlah SKPD banyak tidak menjadikan pemerintah daerah kabupaten/kota lebih sulit melakukan pengaturan dan kompleks. (Martani dan Zaelani 2011).

4.4.5 Ukuran Pemerintah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal

Dari uji hipotesis kelima yang dinyatakan dengan notasi (H_5) menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal Kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil uji hipotesis kelima Ukuran Pemerintah berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada periode 2013 sampai 2015 dinyatakan bahwa (H_5) diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Ukuran Pemerintah berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2013 sampai 2015. Hal ini juga dapat dilihat dari output yang dihasilkan dengan menggunakan uji t yang menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} .

Hasil ini menjelaskan bahwa Ukuran Pemerintah berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Hasil ini mengindikasikan bahwa Pemerintah daerah selaku organisasi pemerintah yang termasuk dalam kategori organisasi nirlaba, memiliki sumber-sumber aset atau kekayaan yang mampu menggambarkan ukuran pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki jumlah aset yang banyak berarti mampu mendukung kegiatan ekonomi daerahnya.

Tetapi, banyaknya aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah belum tentu diiringi dengan kemampuan yang memadai atas pencatatan aset sesuai dengan standar yang berlaku sehingga sering terjadi kendala untuk melaporkannya dalam laporan keuangan karena belum semua aset yang dimiliki pemerintah dicatat dengan baik. Diperlukan suatu pengawasan internal yang baik terhadap aset agar tidak terjadi penyalahgunaan aset. Dan dalam penelitian ini ukuran pemerintah daerah diukur menggunakan jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk dari suatu daerah maka semakin besar pula pendanaan yang digunakan untuk layanan publik dan permasalahan yang timbul dari daerah tersebut semakin kompleks. Organisasi yang besar juga memiliki sumber daya ekonomi yang lebih banyak, sehingga membutuhkan koordinasi dan sistem pengendalian internal yang memadai. Bila dilihat dari *agency theory*, adanya ketidakseimbangan informasi antara Pemerintah dengan masyarakat menyebabkan asimetri informasi. Efek dari asimetri informasi bisa berupa *moral hazard* yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan aset negara. (Anthony dan Govindarajan, 2001). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah akan berpengaruh positif terhadap temuan audit sistem pengendalian internal.